

LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2021

Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Konser Bundengan

Alamat : Jln. Abdurrahman Wahid No. 104, Wonosobo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai OPD adalah salah satu entitas Pelaporan dibawah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Disamping itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Wonosobo, 11 Februari 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Wonosobo

AGUS WIBOWO, S.Sos.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19731019 199302 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur pada suatu periode pelaporan.

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

1.1.2. Tujuan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajiakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntabilitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan;
- Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi dan

akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

- i. Laporan Realisasi Anggaran
- ii. Neraca
- iii. Laporan Operasional
- iv. Laporan Perubahan Ekuitas

1.2. Landasan Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal – hal berikut ini apabila belum diungkapkan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

- Lain;Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keugian Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kab. Wonosobo;
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021;
 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 ; dan
 26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 disusun agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang – kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab. III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

- 3.1.1. Pendapatan LRA
- 3.1.2. Belanja LRA

3.2. Neraca

- 3.2.1. Aset
- 3.2.2. Kewajiban
- 3.2.3. Ekuitas

3.3. Laporan Operasional

- 3.3.1. Pendapatan LO
- 3.3.2. Beban LO
- 3.3.3. Surplus / Defisit

3.4. Laporan Perubahan ekuitas

Bab. IV Penutup

BAB II
IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ringkasan Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2021

Selama periode berjalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengadakan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) dari DPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
PENDAPATAN	5.025.000.000	3.484.332.500	69,34	2.710.855.200
Pendapatan Asli Daerah	5.025.000.000	3.484.332.500	69,34	2.710.855.200
Pendapatan Retribusi Daerah	5.020.000.000	3.190.819.500	63,56	2.580.878.700
Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah	5.000.000	293.513.000	5.870,26	129.976.500
BELANJA	21.304.427.395	20.008.164.093	93,92	8.722.075.281
Belanja Operasi	9.578.491.195	8.502.450.349	88,77	6.620.822.462
Belanja Modal	11.725.936.200	11.505.713.744	98,12	2.101.252.819
SURPLUS/(DEFISIT)	(16.279.427.395)	(16.523.831.593)	101,50	(6.011.220.081)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.279.427.395)	(16.523.831.593)	101,50	(6.011.220.081)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 3.484.332.500,00 atau 69,34 % dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.025.000.000,00. Capaian tersebut karena adanya pandemic *covid-19* hingga tahun tersebut yang belum selesai sehingga obyek wisata belum buka hingga akhir September 2021.
2. Belanja Tahun Anggaran 2021 dapat terealisasi sebesar Rp. 20.008.164.093,00 atau 93,92 % dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 21.304.427.395,00. Capaian realisasi tersebut hamper menyampai 100%.
3. Defisit anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp. 16.279.427.395,00) dengan realisasi sebesar Rp. 16.523.831.593,00 atau mencapai 101,50 %.
4. SILPA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mencapai (Rp. 16.523.831.593,00) dari anggaran sebesar (Rp. 16.279.427.395,00).

2.2 Realisasi TA 2021 Dibandingkan Dengan Realisasi TA 2020

URAIAN	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/(Turun)
Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	5.025.000.000	2.710.855.200	2.314.144.800
Belanja	21.304.427.395	8.722.075.281	12.582.352.114
Surplus/(Defisit)	(16.279.427.395)	(6.011.220.081)	(10.268.207.314)
Pembiayaan	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-
SILPA	(16.279.427.395)	(6.011.220.081)	(10.268.207.314)

Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- 2.2.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.025.000.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.710.855.200,00. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan yang sangat signifikan realisasi pendapatan TA. 2021 sebesar Rp. 2.314.144.800,00 dibandingkan TA. 2020.
- 2.2.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan dari Rp. 8.722.075.281,00 pada Tahun 2020 menjadi Rp. 21.304.427.395,00..
- 2.2.3 SILPA Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar (Rp. 10.268.207.314,00) dibandingkan SILPA Tahun 2020.

2.3 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi

- 2.3.1 Hambatan dalam pencapaian target Pendapatan.

Secara umum kondisi Pendapatan Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya, ketertiban, keamanan, dan terutama dampak dari pandemik *covid-19* sedangkan faktor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arah dan kebijakan unit pengelola pendapatan. Faktor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum pendapatan Daerah.

Adapun permasalahan utama pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah :

- 2.3.1.1 Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikan retribusi;
- 2.3.1.2 Peran serta masyarakat dalam upaya ikut serta mendukung Sapta Pesona didaerah masih rendah;

- 2.3.1.3 Belum ada pembaharuan beberapa peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga, desa wisata, dan usaha pariwisata; dan
- 2.3.1.4 Kesadaran legalitas usaha pariwisata masih perlu ditingkatkan.

2.3.2 Hambatan dalam pencapaian target Belanja

Hambatan dalam pencapaian target Belanja antara lain :

- 2.3.2.1 Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang manajemen pariwisata, bahasa asing, perhotelan, teknik arsitektur, dan akuntansi, serta bidang lainnya;
- 2.3.2.2 Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang keluarannya diperubahan anggaran;
- 2.3.2.3 Kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik; dan
- 2.3.2.4 Sistem Pengawasan dari BPK, BPKP, dll. dianggap sebagai penyebab terhambatnya proses tender pengadaan, misalnya pejabat ada yang enggan ditunjuk menjadi pemimpin proyek atau panitia pengadaan karena takut akan resiko dan ketidakpastian regulasi.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.1.1. Pendapatan LRA

Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, berupa :

3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

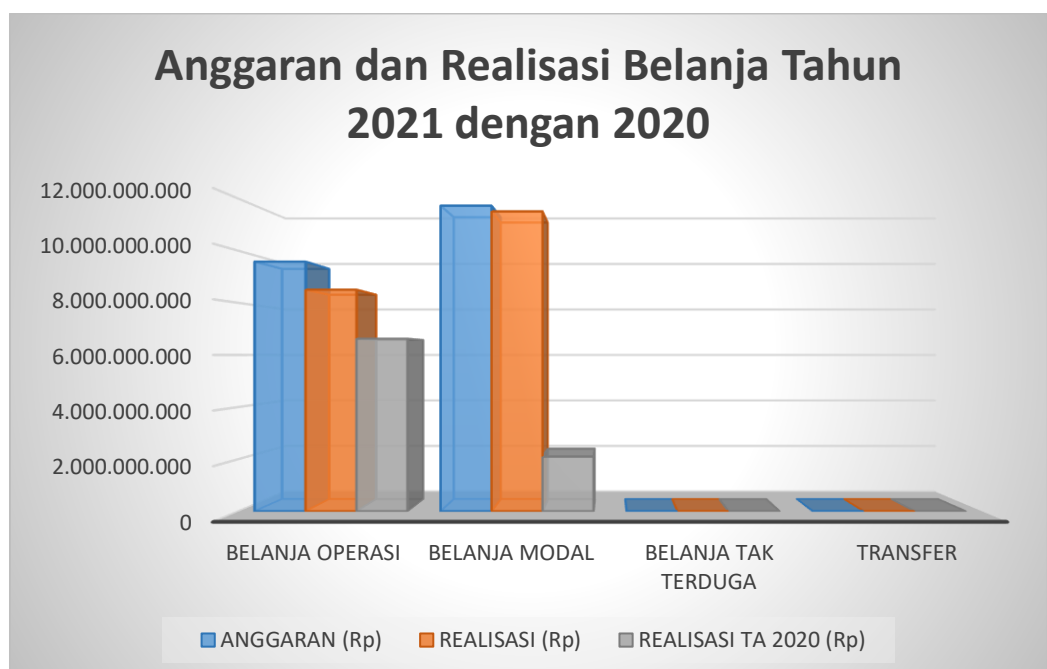
Realisasi retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 3.190.819.500,00. Adapun retribusi Daerah hanya berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

3.1.1.2. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 293.513.000,00 berasal dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang sah.

3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :



Secara garis besar, anggaran dan realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2021 serta realisasi TA. 2020 disajikan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI TA 2020 (Rp)
Belanja Operasi	9.578.491.195	8.502.450.349	6.620.822.462
Belanja Modal	11.725.936.200	11.505.713.744	2.101.252.819
Belanja Tak Terduga	-	-	-
Transfer	-	-	-
Jumlah	21.304.427.395	20.008.164.093	8.722.075.281

Realisasi Belanja TA. 2021 sebesar Rp. 20.008.164.093,00 dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 21.304.427.395,00. Bila dibandingkan dengan TA. 2020, realisasi belanja sebesar Rp 8.722.075.281,00. Hal ini disebabkan oleh :

1. Realisasi belanja operasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.076.040.846,00 dibandingkan anggaran. Realisasi belanja tersebut lebih kecil dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 6.620.822.462,00.
2. Realisasi belanja modal Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 220.222.456,00 dibandingkan anggaran 2021. Realisasi belanja modal tersebut lebih besar dari realisasi Tahun 2020, dengan kenaikan sebesar Rp. 9.404.460.925,00.

Berikut uraian lebih lanjut realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 :

3.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi Tahun Anggaran 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.502.450.349,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9.578.491.195. Anggaran dan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 serta TA. 2020 sebagai berikut :

BELANJA OPERASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI TA 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	4.110.528.145	3.921.361.522	95,40	3.549.358.311
Belanja Barang dan Jasa	4.960.563.050	4.518.773.827	91,09	2.812.554.151
Belanja Hibah	507.400.000	62.315.000	12,28	184.310.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	74.600.000
Jumlah	9.578.491.195	8.502.450.349	93,92	6.620.822.462

Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020, Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.881.627.887,00 atau 28,42 %.

3.1.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Tahun Anggaran 2021 dapat terealisasi sebesar Rp. 11.505.713.744,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 11.725.936.200,00.

BELANJA MODAL	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI TA 2020 (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin	262.228.000	247.601.000	94,42	4.500.000
Belanja Bangunan dan Gedung	11.369.308.200	11.165.506.249	98,21	2.096.752.819
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	94.400.000	92.606.495	98,10	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	11.725.936.200	11.505.713.744	98,12	2.101.252.819

Penjelasan :

3.1.2.2.1. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 247.601.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,00. Adapun persentase realisasi tersebut sebesar 94,42 %.

3.1.2.2.2. Belanja Bangunan dan Gedung

Realisasi belanja bangunan dan Gedung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 11.165.506.249,00 atau mencapai 98,21 % dari anggaran sebesar Rp. 11.369.308.200,00. Adapun belanja bangunan dan Gedung tersebut terdiri dari belanja rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Rekreasi kaliangnet dan Taman Syailendra. Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.096.752.819,00. Belanja bangunan dan Gedung tersebut berupa pembangunan Rehabilitasi fasilitas dan amenitas Situs Tuk Bimolukar.

3.1.2.2.3. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 92.606.495,00 dari anggaran Rp. 94.400.000 atau 98,10 %. Adapun realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 tidak ada. Hal tersebut karena adanya *refocusing* berkaitan pandemik **Covid-19**..

3.2. Neraca

Neraca Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 menunjukkan posisi Aset sebesar Rp. 63.161.150.279,90. Kewajiban sebesar Rp. 8.956.471,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 63.152.193.808,90 sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	LEBIH/KURANG (%)
Aset	63.161.150.279,90	53.018.569.089,50	19,16
Kewajiban	8.956.471,00	3.914.947,00	128,78
Ekuitas	63.152.193.808,90	53.014.654.142,50	19,15
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	63.161.150.279,90	53.018.569.089,50	19,16

3.2.1. Aset

Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 63.161.150.279,90 dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut :

3.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 47.544.627,54 terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Penerima	Rp.	14.053.000,00
2. Piutang Retribusi Daerah	Rp.	4.200.000,00
3. Piutang Lain-lain PAD yang sah	Rp.	111.513.000,00
4. Penyisihan Piutang	(Rp.	92.831.500,00)
5. Persediaan	Rp.	10.610.127,54
Jumlah	Rp.	47.544.627,54

Aset lancar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya terdiri dari kas di bendahara penerima, piutang pendapatan, dan persediaan, sedangkan untuk kas di bendahara pengeluaran, setara kas, investasi jangka pendek, piutang lainnya, penyisihan piutang, dan beban dibayar dimuka tidak ada aset lancar-nya. Berikut penjelasan dari 3 rincian tersebut diatas :

1. Kas di Bendahara Penerima

Saldo Kas di Bendahara Penerima per Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp. 14.053.000,00 dan

Rp. 38.362.400,00. Kas tersebut meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerima yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Daerah.

2. Piutang Retribusi Daerah

Saldo piutang pendapatan per Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.200.000,00 dan Rp. 4.200.000,00 atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Piutang pendapatan dari retribusi Daerah merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

3. Piutang Lain-lain PAD yang sah

Saldo tersebut per Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp. 111.513.000,00 dan Rp. 243.460.000,00

4. Penyisihan Piutang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai penyisihan piutang pada Tahun 2021 dan 2022 sebesar (Rp. 92.831.500,00) dan (Rp. 144.179.875,00).

5. Persediaan

Nilai persediaan per Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.610.127,54 dan Rp. 23.756.431,14. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per Tanggal 31 Desember 2021 adalah alat/bahan untuk kegiatan kantor yang terdiri dari persediaan alat tulis kantor, persediaan kertas dan cover sebesar, perangko, materai, benda pos dan cetak, dan persediaan bahan komputer.

3.2.1.2. Aset Tetap

Asset Tetap per 31 Desember 2021 senilai Rp. 62.435.929.798,36 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan saldo akhir Tahun 2020 sebesar Rp. 52.144.354.327,36 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.291,575.471,00 dari Tahun 2020. Adapun rincian aset tetap selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	LEBIH/ KURANG (%)
Tanah	12.290.648.383,00	12.290.648.383,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.824.158.339,78	2.270.184.286,78	24,40
Gedung dan Bangunan	51.054.194.242,36	40.129.514.750,36	27,22
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	2.859.876.500,00	2.752.875.191,00	3,88
Aset Tetap Lainnya	472.608.698,00	468.908.698,00	0,79
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	247.728.521,00	(100)
Akumulasi Penyusutan	(7.340.740.364,78)	(6.015.505.502,78)	22,03
Jumlah	62.435.929.798,36	52.144.354.327,36	19,74

Adapun penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sebagai berikut :

3.2.1.2.1. Tanah

No	Uraian	Saldo Awal (Audited 2020) (Rp)	Koreksi (Rp)		Mutasi (Rp)		Saldo Akhir 2021 (Rp)
			D	K	D	K	
I	Tanah Persil	1.404.331.000,00	275.184.000,00	-	-	-	1.679.515.000,00
1	Tanah untuk Bangunan, Gd. Perdagangan/Perusahaan	1.014.500.000,00	275.184.000,00	-	-	-	1.289.684.000,00
2	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	389.831.000,00	-	-	-	-	389.831.000,00
II	Tanah non Persil	6.473.082.865,00	-	-	-	-	6.473.082.865,00
1	Tanah Kering	6.473.082.865,00	-	-	-	-	6.473.082.865,00
III	Lapangan	4.413.234.518,00	-	-	-	-	4.413.234.518,00
1	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	24.500.000,00	-	-	-	-	24.500.000,00
2	TANAH LAPANGAN PARKIR	18.050.000,00	-	-	-	-	18.050.000,00
3	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	121.500.000,00	-	-	-	-	121.500.000,00
4	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	740.875.470,00	-	-	-	-	740.875.470,00
5	TANAH UNTUK TAMAN	3.508.309.048,00	-	-	-	-	3.508.309.048,00
	Jumlah	12.290.648.383,00	275.184.000,00	-	-	-	12.565.832.383,00

Terdapat koreksi debit pada aset tanah sebagaimana tabel diatas, namun tidak ada mutasi debit maupun kredit pada Tahun 2021. Pada Tahun Anggaran 2021 ada penambahan aset koreksi debit pada tanah persil berupa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sebesar Rp. 275.184.000,00.

3.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan per Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 2.824.158.339,78 dan Rp. 2.270.184.286,78. Aset tersebut mengalami perubahan dari Tahun 2020.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2021	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2021
		D	K	D	K	
Alat-alat Bantu	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
Alat Angkut	544.611.204,00	-	-	325.750.000,00	-	870.361.204,00
Alat Bengkel & Ukur	12.283.700,00	-	-	-	-	12.283.700,00
Alat Pertanian	12.999.525,00	-	-	-	-	12.999.525,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.069.859.185,00	52.156.488,00	40.706.435,00	85.576.000,00	-	1.166.885.238,00
Komputer	307.292.572,00	50.238.000,00	-	9.899.000,00	-	367.429.572,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	116.218.457,00	3.850.000,00	86.539.000,00	110.586.000,00	-	144.115.457,00
Alat Kesehatan	25.160.404,00	-	-	-	-	25.160.404,00
Peralatan Olah Raga	176.759.239,80	-	-	-	-	176.759.239,80
Rambu-rambu	0,00	-	-	43.164.000,00	-	43.164.000,00
Jumlah	2.270.184.286,78	106.244.488,00	128.995.435,00	576.725.000,00	0,00	2.824.158.339,78

Penjelasan Mutasi :

1. Alat-Alat Besar

Nilai aset tetap berupa alat-alat bantu per Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 sama dengan kondisi akhir Tahun 2020. Alat bantu tersebut berupa pompa.

2. Alat Angkut

Saldo aset tetap berupa alat angkut berupa alat angkutan darat bermotor dan tidak bermotor per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 870.361.204,00 yang berbeda dengan kondisi Tahun 2020 sebesar Rp. 544.611.204,00. Perubahan aset karena adanya mutase debit sebesar Rp. 325.750.000,00 berupa mobil dinas Toyota Innova untuk operasional kepala dinas berasal dari serah terima dari Bagian Umum yaitu kendaraan bermotor Toyota Innova bernomor polisi

AA 31 F dan belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.300.000,00 berupa kendaraan tak bermotor angkutan barang.

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Nilai aset tetap berupa alat ukur per 31 Desember 2021 dan 2020 tidak mengalami kenaikan/penurunan yaitu sebesar Rp. 12.283.700,00. Adapun alat ukur dimaksud berupa Jangka Sorong (Rp. 1.600.000,00), *GPS* (Rp. 3.099.800,00), *Digital Meter* (Rp. 3.000.800,00), dan Alat Timbang Digital (Rp. 4.582.600,00).

4. Alat Pertanian

Nilai aset tetap berupa alat pengolahan per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.999.525,00.

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Nilai aset tetap berupa alat kantor per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp. 1.069.859.185,00. Mengalami penambahan sebesar Rp. 137.732.488,00 berasal dari penambahan barang modal Tahun 2021 Rp. 66.926.000,00 dan hibah dari PT. Geodipa Energy berupa LCD Rp. 12.500.000,00 dan amplifier Rp. 6.150.000,00. Pengurangan dengan koreksi kredit sebesar Rp. 40.706.435,00 karena adanya koreksi beban persediaan, beban jasa, dan beban perjalanan sehingga nilai Tahun 2021 menjadi Rp. 1.166.885.238,00.

6. Komputer

Nilai aset tetap berupa komputer per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 367.429.572,00 sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp. 307.292.572,00. Adanya penambahan aset tersebut karena terjadi mutasi debet sebesar Rp. 9.899.000,00 berasal dari hibah PT. Geodipa Energy berupa PC Unit dan adanya koreksi debet Rp. 50.238.000,00 berasal dari reklas antar akun.

7. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Nilai aset tetap tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 144.115.457,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2020 Rp. 116.218.457,00. Mengalami/terjadi mutasi maupun debet dari barang modal Tahun Anggaran 2021

sebesar Rp. 110.586.000,00 dari koreksi kredit berupa reklas antar akun sebesar Rp. 86.539.000,00.

8. Alat Kesehatan

Nilai aset tetap berupa alat kedokteran pada Tahun 2021 dan 2020 terdapat aset tersebut sebesar Rp. 25.160.404,00.

Tidak ada mutasi debit dan kredit.

9. Peralatan Olah Raga

Nilai aset tetap berupa peralatan olah raga per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 176.759.239,78 dan

tidak ada mutase pada Tahun 2021.

10. Rambu-Rambu

Nilai rambu-rambu per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 43.164.000,00 berupa rambu-rambu petunjuk destinasi yang berasal dari penambahan belanja modal Tahun Anggaran 2021.

3.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 51.054.194.242,36 dan Rp. 40.129.514.750,36 mengalami koreksi debit sebesar Rp. 10.725.428.560,00 dan kredit Rp. 10.966.255.317,00 serta mutasi debit Rp. 11.165.506.249,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2021	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2021
		D	K	D	K	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.865.132.904,36	10.725.428.560,00	10.962.555.317,00	11.161.806.249,00	-	50.789.812.396,36
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	149.731.470,00	-	-	-	-	149.731.470,00
Tugu Peringatan	114.650.376,00	-	3.700.000,00	3.700.000,00	-	114.650.376,00
Jumlah	40.129.514.750,36	10.725.428.560,00	10.966.255.317,00	11.165.506.249,00	-	51.054.194.242,36

Penjelasan Mutasi :

1. Bangunan Gedung Tempat Kerja

Nilai aset tetap berupa bangunan gedung tempat kerja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 50.789.812.396,36 dan Rp. 39.865.132.904,36 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Belanja modal dan bangunan berupa penataan dan pembangunan sarana dan prasarana di Taman Rekreasi Kalianget dan

Taman Syailendra sebesar Rp. 11.161.806.249,00 koreksi debit dan kredit berasal dari reklas antar akun.

2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Nilai aset tetap berupa bangunan Gedung tempat tinggal per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 149.731.470,00, tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2020.

3. Tugu Peringatan

Nilai aset tetap berupa Tugu Peringatan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 114.650.376,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari tahun sebelumnya.

3.2.1.2.4. Jalan, Jaringan, dan Instalasi

Nilai jalan, jaringan, dan instalasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 2.859.876.500,00 dan Rp. 2.752.875.191,00, mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Mutasi transaksi terhadap jalan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2020	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2021
		D	K	D	K	
Jalan	1.536.268.060,00	-	-	-	-	1.536.268.060,00
Bangunan Air Irigasi	683.936.631,00	-	-	-	-	683.936.631,00
Instalasi	487.990.500,00	92.606.495,00	92.606.495,00	92.606.495,00	-	580.596.995,00
Jaringan	44.680.000,00	14.394.814,00	-	-	-	59.074.814,00
Jumlah	2.752.875.191,00	107.001.309,00	92.606.495,00	92.606.495,00	-	2.859.876.500,00

Penjelasan mutasi :

1. Jalan dan Jembatan

Nilai aset tetap berupa jalan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 1.536.268.060,00. Tidak mengalami koreksi kredit-debet dan mutasi debit-kredit.

2. Bangunan Air

Nilai aset tetap berupa bangunan air irigasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 683.936.631,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari tahun sebelumnya.

3. Instalasi

Nilai aset tetap tersebut per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 580.596.995,00 dan

Rp. 487.990.500,00. Mengalami penambahan sebesar Rp. 92.606.495,00 dari belanja modal Tahun Anggaran 2021.

4. Jaringan

Nilai aset tetap berupa jaringan listrik per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 59.074.814,00 dan Rp. 44.680.000,00. Mengalami penambahan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.394.814,00 dari belanja modal Tahun Anggaran 2021.

3.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sama sebesar Rp. 472.608.698,00 dan Rp. 468.908.698,00. Mengalami penambahan dari Tahun 2020 berupa replica batu nisan. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2021	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2021
		D	K	D	K	
Bahan Perpustakaan	253.136.000,00	-	-	-	-	253.136.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	67.406.748,00	3.700.000,00	-	-	-	71.106.748,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	148.365.950,00	-	-	-	-	148.365.950,00
Jumlah	468.908.698,00	3.700.000,00	-	-	-	472.608.698,00

Penjelasan mutasi :

1. Bahan Perpustakaan

Nilai aset tetap berupa buku per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 253.136.000,00 tidak mengalami penambahan atau pengurangan dari Tahun 2020.

2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Nilai aset tetap berupa barang bercorak kesenian per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 71.106.748,00 dan Rp. 67.406.748,00. Mengalami penambahan untuk replika batu nisan sebesar Rp. 3.700.000,00.

3. Aset Tetap Dalam Renovasi

Nilai aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 148.365.950,00. Tidak mengalami penambahan atau pengurangan.

3.2.1.2.6. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp. 6.013.304.198,78) dan

(Rp. 4.851.265.271,78). Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mutasi transaksi terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2021 (Audited 2020)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2020
		D	K	D	K	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.791.275.921,78)	-	233.623.323,00	-	96.264.880,00	(2.121.164.124,78)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.961.756.345,00)	6,00	809.212.863,00	-	-	(3.770.969.202,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.177.970.216,00)	2,00	188.501.080,00	-	-	(1.366.471.294,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(84.503.020,00)	-	14.836.595,00	-	-	(99.339.615,00)
Jumlah	(6.015.505.502,78)	8,00	1.246.173.861,00	-	96.264.880,00	(7.357.944.235,78)

Penjelasan mutasi :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berupa penyusutan alat angkutan darat bermotor alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat studio, dan alat komunikasi. Adapun Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp. 1.791.275,78) terdapat koreksi kredit sebesar (Rp. 233.623.323,00) dan mutasi debet (Rp. 96.264.880,00), sedangkan Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp. 1.789.074.617,78).

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar (Rp. 3.770.969.202,00) dan (Rp. 2.961.756.345,00). Terdapat koreksi debet Rp. 6,00 dan kredit Rp. 809.212.863,00, dan tidak terjadi mutasi debet maupun kredit. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan berupa bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, dan tugu peringatan.

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebesar (Rp. 1.366.471.294,00) dan (Rp. 1.177.970.216,00). Terdapat koreksi debit Rp. 2,00 dan kredit sebesar (Rp. 188.501.080,00). Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan, bangunan air irigasi, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/baku, dan instalasi air minum/air bersih.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebesar (Rp. 99.339.615,00) dan (Rp. 84.503.020,00). Terdapat koreksi kredit sebesar (Rp. 14.836.595,00).

3.2.1.3. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 694.879.725,00 dan Rp. 708.615.806,00 mengalami pengurangan dari Tahun 2020. Adapun pengurangan tersebut berasal dari koreksi kredit sebesar Rp. 442.085,00 dan mutasi debit Rp. 124.445.780,00 serta mutase kredit Rp. 137.739.776,00. Mutasi transaksi terhadap aset lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 2021 (Audited 2020)	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir 2021
		D	K	D	K	
Aset Tak Berwujud	4.420.849,00	-	-	-	-	4.420.849,00
Aset Lain-lain	707.289.551,00	-	-	124.445.780,00	137.739.776,00	693.995.555,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.094.594,00)	-	442.085,00	-	-	(3.536.639,00)
Jumlah	708.615.806,00	-	442.085,00	124.445.780,00	137.739.776,00	694.879.725,00

3.2.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 4.420.849,00. Tidak mengalami pengurangan/penambahan. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapun aset tak berwujud tersebut adalah *software* dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud lainnya.

3.2.1.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 693.995.555,00 dan Rp. 707.289.551,00,00. Mengalami mutase debet Rp. 124.445.780,00 dan kredit Rp. 137.739.776,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas dan sudah dilakukan proses penghapusan.

3.2.1.3.3. Akuntabilitas Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tersebut per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp. 3.536.639,00) dan (Rp. 3.094.594,00). Terjadi koreksi kredit sebesar Rp. 442.085,00 berupa perhitungan amortisasi asset tidak berwujud.

3.2.2. Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 8.956.471,00 dan Rp. 3.914.947,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya memiliki kewajiban jangka pendek berupa utang beban sebesar Rp. 8.956.471,00 berupa utang beban jasa kantor-tagihan telepon Rp. 706.170,00, utang hibah jasa kantor-tagihan listrik Rp. 7.758.421,00 dan utang beban jasa kantor-tagihan internet Rp. 321.500,00.

3.2.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 63.169.397.679,00 dan Rp. 53.014.654.142,50 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/deficit operasional.

3.3.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak Dinas Pariwisata dan Kabudayaan yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang tidak perlu dibayar kembali Periode Tahun Anggaran 2020, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut :

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	3.351.685.500,00	2.858.719.457,00	492.966.043,00	17,24
Pendapatan Transfer-LO	-	-	-	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	45.739.150,00	-	45.739.150,00	-
Jumlah	3.397.424.650,00	2.858.719.457,00	538.705.193,00	18,84

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 3.397.424.650,00 dan Rp. 2.858.719.457,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.858.719.457,00 atau sebesar (18,84 %). Realisasi masing-masing pendapatan-LO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya bersumber dari pendapatan retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan retribusi Daerah berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga serta hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu sebesar Rp. 3.351.685.500,00 dan Rp. 2.858.719.457,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.858.719.457,00 atau 17,24 % dari Tahun 2020.

3.3.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat lainnya, Pemerintah Daerah lainnya, maupun bantuan keuangan baik Tahun 2021 dan 2020.

3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pendapatan lain-lain Daerah yang sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 45.739.150,00 berasal dari sumbangan Pihak Ketiga PT. Geodipa energy sebesar Rp. 28.549.000,00 dan PT. Bank Jateng Cabang Wonosobo sebesar Rp. 17.190.150,00.

3.3.2. Beban

Beban sesuai PSAP 12 adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Adapun realisasi beban Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.440.514.281,00 dan Rp. 8.178.894.278,90 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.261.620.002 atau sebesar 27,65 % dari Tahun 2020.

URAIAN	2021	2020	+ / -	%
Beban Pegawai-LO	3.916.828.493,00	3.549.358.311,00	367.470.182	10,35
Beban Barang dan Jasa	5.136.980.155,00	3.074.828.439,90	2.062.151.715	67,07
Beban Hibah	62.315.000,00	184.310.000,00	(121.995.000)	-66,19
Beban Bantuan Sosial	-	74.600.000,00	(74.600.000)	-100,00
Beban Penyisihan Piutang	92.831.500,00	144.179.875,00	(51.348.375)	-35,61
Beban Lain-lain	2.147.060,00	-	2.147.060	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	233623323	184.195.098,00	49.428.225	26,83471251
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	792.008.990,00	763.865.717,00	28.143.273	3,68
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	188.501.080,00	188.278.158,00	222.922	0,12
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.836.595,00	14.836.595,00	0	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	442.085,00	442.085,00	0	0,00
Jumlah	10.440.514.281,00	8.178.894.278,90	2.261.620.002	27,65

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 dan 2020 tidak memiliki Beban berupa beban bunga, beban subsidi, beban penyisihan piutang, beban bantuan sosial, beban lain-lain, dan beban transfer bagi hasil pajak Daerah.

3.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai pada Tahun 2021 sebesar RP. 6.942.292.992,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian Beban Pegawai	Jumlah (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO		4.691.065.472,00
1	Beban Gaji Pokok ASN	1.842.229.120,00
2	Beban Gaji Pokok PNS	1.842.229.120,00
3	Beban Tunjangan Keluarga ASN	174.505.294,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PNS	174.505.294,00
5	Beban Tunjangan Jabatan ASN	146.810.000,00
6	Beban Tunjangan Jabatan PNS	146.810.000,00

7	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.480.000,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	62.480.000,00
9	Beban Tunjangan Beras ASN	112.251.000,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS	112.251.000,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.229.322,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.229.322,00
13	Beban Pembulatan Gaji ASN	28.000,00
14	Beban Pembulatan Gaji PNS	28.000,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN		2.251.227.520,00
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	594.242.698,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	594.242.698,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	85.689.065,00
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	85.689.065,00
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	891.363.994,00
6	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	891.363.994,00
Jumlah Beban Pegawai		6.942.292.992,00

3.3.2.2. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.780.757.434,60. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Persediaan	Jumlah (Rp)
Beban Barang Pakai Habis		1.778.185.459,60
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	51.867.410,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	5.250.000,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.842.350,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	474.038.014,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.244.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69.477.781,14
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	59.213.575,00

8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	203.957.872,46
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.313.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.749.070,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	48.310.250,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	23.706.100,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	71.240.150,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	89.130.887,00
15	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	219.995.000,00
16	Beban Makanan dan Minuman Rapat	404.742.000,00
17	Beban Pakaian Teknik	3.358.000,00
18	Beban Pakaian Batik Tradisional	23.050.000,00
19	Beban Pakaian Olahraga	16.700.000,00
Beban Barang Tak Habis Pakai		2.571.975,00
1	Beban Pipa-Pipa Lainnya	2.571.975,00
Jumlah Beban Persediaan		1.780.757.434,60

3.3.2.3. Beban Jasa

Jumlah beban jasa Tahun 2021 sebesar Rp. 2.520.051.115,00. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Jasa	Jumlah (Rp)
Beban Jasa Kantor		1.792.431.715,00
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	199.650.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	70.900.000,00
3	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.875.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Administrasi	703.495.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	202.074.560,00
6	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	181.050.000,00
7	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	207.019.500,00
8	Beban Jasa Pengukuran Tanah	2.502.000,00

9	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	133.957.500,00
10	Beban Tagihan Telepon	8.521.768,00
11	Beban Tagihan Air	2.553.348,00
12	Beban Tagihan Listrik	64.709.539,00
13	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00
14	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.443.500,00
15	Beban Registrasi/Keanggotaan	4.200.000,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi		73.958.400,00
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.736.000,00
2	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	53.222.400,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin		294.050.000,00
1	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	54.500.000,00
2	Beban Sewa Peralatan Umum	15.300.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan		112.125.000,00
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.775.000,00
2	Beban Sewa Hotel	106.350.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi		46.066.000,00
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	22.048.000,00
2	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	17.880.000,00
3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.138.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi		136.861.000,00
1	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	136.861.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		64.559.000,00
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	64.559.000,00
Jumlah Beban Jasa		2.520.051.115,00

3.3.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp. 237.352.644,00. Beban Pemeliharaan adalah merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Jumlah (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		89.108.254,00
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	70.913.254,00
2	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	18.195.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		131.244.390,00
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	26.444.390,00
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	104.800.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		17.000.000,00
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	17.000.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		237.352.644,00

3.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Tahun 2021 sebesar Rp. 364.109.962,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Perjalanan Dinas	Jumlah (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	204.839.962,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	159.270.000,00
Jumlah Perjalanan Dinas		364.109.962,00

3.3.2.6. Beban Hibah

Beban hibah pada Tahun 2021 sebesar Rp. 62.315.000,00. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yaitu berupa hibah alat kesenian kepada kelompok kesenian.

3.3.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 1.246615.944,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

3.3.2.8. Beban Lain-lain

Beban lain-lain pada Tahun 2021 sebesar Rp. 94.978.560,00. Beban lain-lain tersebut berupa beban penyisihan piutang retribusi. Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Beban Lain-lain	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	4.200.000,00
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	88.631.500,00
3	Lain-lain	2.147.060,00
Jumlah Beban Lain-lain		94.978.560,00

3.3.3. Kegiatan Non Operasional

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp. 12.593.996,00.

3.3.4. Pos Luar Biasa

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak terdapat pendapatan luar biasa maupun beban luar biasa.

3.3.5. Surplus/Defisit LO

Realisasi surplus/defisit-LO Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp. 7.072.887.498,60). Apabila dibandingkan dengan realisasi surplus/defisit-LO Tahun 2020 sebesar (Rp. 5.668.670.025,90), maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.404.217.472,70 atau 24,77 %.

3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas selama Tahun Anggaran 2021. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 63.169.397.679,90 berasal dari saldo awal ekuitas per Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 ditambah defisit-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp. 7.055.683.627,60) ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp. 710.904.972,00) dan kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 16.499.522.193,00.

3.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 53.014.654.142,50 berasal dari saldo ekuitas neraca per 31 Desember 2020 setelah audit.

3.4.2. Surplus Defisit LO Tahun Anggaran 2021

Surplus/defisit-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp. 7.055.683.627,60) berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dapat dilihat pada laporan operasional.

3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan atas ekuitas awal sebesar Rp. 710.904.972,00 yang terdiri dari koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 16.499.522.193,00 selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp. 0,00 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 38.362.400,00.

3.4.4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Dalam hal pencatatan kewajiban selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan (perkembangan) yang terjadi dalam pelaporan keuangan. Kewajiban untuk dikonsolidasikan dari laporan perubahan ekuitas adalah sebesar Rp. 16.499.522.193,00.

BAB IV PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam Tahun Anggaran 2021 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021.

Wonosobo, 11 Februari 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Wonosobo

AGUS WIBOWO, S.Sos.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19731019 199302 1 001

LAMPIRAN